

KEKUATAN NASIONAL TIONGKOK DALAM SENGGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN

Sukawarsini Djelantik
Universitas Katolik Parhyangan
Bandung, Indonesia
sukedj@unpar.ac.id

INFO ARTIKEL

Article History

Received

25 July 2021

Revised

22 August 2021

Accepted

23 August 2021

Keywords:

China; South China Sea;
Diplomacy; Information;
Military; Economy.

Kata Kunci:

Tiongkok; Laut Tiongkok
Selatan; Diplomasia;
Informasi; Militer;
Ekonomi.

Abstract

This paper aims to analyse China's position in disputes in the South China Sea by utilizing its national power to control the waters. For this purpose, qualitative research and the concept of national power (DIME) are used. The results showed that to confirm these claims, China took various actions. From the diplomatic aspect, China controls countries in Southeast Asia which are part of the Belt and Road Initiative (BRI) infrastructure project funded by the Asian Investment Infrastructure Bank (AIIB). From the information aspect, China uses cyber power in managing technology and propaganda to support its foreign policy. From the military aspect, China has carried out the construction of artificial islands equipped with military facilities. From the economic aspect, China's growth is very fast and respected in the last few decades. It is concluded that, China is a big country that has managed to match the power and influence of the US in the region. National advantage and power are used to increase the influence and support of the disputing countries.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis posisi Tiongkok dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan dengan memanfaatkan kekuatan nasionalnya untuk menguasai perairan. Untuk tujuan ini, penelitian kualitatif dan konsep kekuatan nasional (DIME) digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengkonfirmasi klaim tersebut, Tiongkok melakukan berbagai tindakan. Dari aspek diplomatik, Tiongkok menguasai negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan bagian dari proyek infrastruktur *Belt and Road Initiative* (BRI) yang didanai oleh *Asian Investment Infrastructure Bank* (AIIB). Dari aspek informasi, Tiongkok menggunakan kekuatan siber dalam mengelola teknologi dan propaganda untuk mendukung kebijakan luar negerinya. Dari aspek militer, Tiongkok telah melakukan pembangunan pulau buatan yang dilengkapi fasilitas militer. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan Tiongkok sangat pesat dan disegani dalam beberapa dekade terakhir. Disimpulkan bahwa, Tiongkok adalah negara besar yang berhasil menandingi kekuatan dan pengaruh AS di kawasan. Kemajuan dan kekuatan nasional digunakan untuk meningkatkan pengaruh dan dukungan dari negara-negara yang bersengketa.

PENDAHULUAN

Perkembangan kekuatan nasional suatu negara di suatu kawasan dapat menjadi ancaman yang mengganggu stabilitas yang ada. Terutama bagi negara adidaya yang terancam posisinya dalam konstelasi kekuatan dunia yang berlaku. Ancaman datang melalui kekuatan dilomasi, informasi, militer dan ekonomi dari negara penantang. Perimbangan kekuatan yang tercipta kemudian berpotensi konflik.

Akhir Perang Dingin telah mengubah posisi negara-negara adidaya dan memunculkan kekuatan baru dunia. Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya menjadi satu-satunya kekuatan pasca kejatuhan Uni Soviet (US), menghadapi tantangan dengan semakin kuatnya posisi Tiongkok dari segi ekonomi, politik, dan strategis. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berkembang sejak akhir tahun 1980an menjadikannya kekuatan baru di Kawasan Indo Pasifik.

AS disisi lain masih memegang peranan signifikan selain berpengaruh kuat dalam bidang politik, strategi, militer, dan ekonomi yang belum

tertandingi. Persaingan AS dan Tiongkok semakin nyata yang ditunjukkan dalam berbagai kesempatan, seperti perang dagang yang berlangsung sejak tahun 2018. Kedua negara juga seringkali terlibat dalam berbagai konflik. Diprediksikan bahwa perang terbuka dapat terjadi karena sejumlah krisis yang tidak terselesaikan, atau ketika terjadi akumulasi krisis berskala kecil atau regional yang semakin meningkat.

Persaingan AS dan Tiongkok pada tingkat global terjadi pada permasalahan teknologi, perdagangan, isu hak asasi manusia, hingga pengaruh dalam organisasi internasional. Di Kawasan Asia, kontestasi terjadi dalam aspek militer yang dipergunakan untuk mendukung pertarungan memperebutkan wilayah tertentu, khususnya pada wilayah strategis jalur perkapalan dan wilayah yang mengandung cadangan hidrokarbon. *The Economist* (2019) melaporkan mengenai tujuan utama Tiongkok adalah menyaingi AS yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain dalam bidang teknologi informasi, teknologi pertanian dan obat-obatan. Pada akhirnya, Perang

Dingin baru tidak terhindarkan. Pertarungan kedua negara tidak terhindarkan karena Tiongkok menganggap AS sebagai penghalang dalam pencapaian sasaran strategisnya. Di lain pihak, AS menganggap Tiongkok menggunakan berbagai cara untuk merebut posisi sebagai negara yang paling berpengaruh di kawasan.

Fenomena kekuatan nasional suatu negara yang mengarah pada perimbangan kekuasaan antar negara yang ada dalam hubungan internasional telah menjadi hirauan banyak diteliti.

James McFadyen (2004) mendukung pentingnya menganalisis kekuatan nasional. Dalam artikelnya McFadyen mengajukan studi kasus penanganan kejahatan transnasional penjualan obat-obatan terlarang dari Columbia tahun 1992. Pembahasannya mengenai efektifitas AS mengimpelentasikan instrumen kekuatan nasional dalam menangani ancaman perdagangan narkoba ilegal serta hubungan historis AS-Columbia (McFadyen 2004). Meskipun isu yang dibahas berbeda, analisis instrumen kekuatan nasional diterapkan untuk meninjau efektifitas strategi secara

keseluruhan serta kebijakan perlawanan terhadap isu nasional. Penelitian McFadyen ini membantu dalam memahami pemakaian instrumen kekuatan nasional melalui studi kasus hubungan AS dengan Kolumbia.

Hirauan selanjutnya dari Cheeppensook (2020) mengenai kontestasi kekuatan nasional negara-negara yang mengancam stabilisasi suatu kawasan. Cheeppensook menyoroti peran ASEAN dalam klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan (LTS) sebagai penyebab destabilisasi di Asia Timur dan Asia Tenggara, serta implikasinya di luar kawasan. Peran ASEAN dibahas melalui upaya-upaya resolusi damai untuk menjaga stabilitas Kawasan, yang disebabkan oleh keterlibatan empat negara ASEAN yang mengklaim langsung kepemilikan LTS. Artikel secara khusus membahas peran dua negara bukan pengklaim, yaitu Singapura dan Thailand, sebagai mediator dalam hubungan ASEAN-Tiongkok selama tahun 2012-2018 (Cheeppensook 2020)

Hirauan berikut dari Simon (2012) membahas mengenai masalah kedaulatan dan kebebasan pelayaran laut di LTS yang melibatkan negara-negara yang mengklaim kepemilikan dan negara-negara maritim besar. Artikel Simon ini memfokuskan pada peran ASEAN dalam mengelola konflik tanpa memfokuskan posisi Tiongkok. Analisisnya terkait upaya-upaya diplomasi bilateral dan multilateral serta kemungkinan jika klaim gagal, yang mana negara-negara pengklaim akan membangun kekuatan militer untuk mempertahankan hak dengan cara kekerasan (Simon 2012).

Yang terakhir adalah hirauan dari Devary (2015). Ia membahas upaya Tiongkok membangun industri besar-besaran dan pulau-pulau reklamasi di LTS, sebagai salah satu kekuatan nasionalnya. Pembangunan pulau-pulau buatan ini merupakan upaya terang-terangan untuk mempertegas klaim yang sesuai dengan politik luar negeri Tiongkok melalui pernyataan: *kami negara besar, kami memiliki kemampuan, dan kami akan membangun apapun yang kami inginkan*" (Devary

2015). Artikel ini mempertegas bagaimana selama ini negara di kawasan hanya memanfaatkan pelaut dan penjaga pantai untuk menahan orang dan kapal asing yang melewati batas teritorial, sementara Tiongkok tanpa ragu merespons sebagai konflik maritim.

Dari beberapa artikel penelitian terdahulu di atas, artikel ini juga membahas mengenai hirauan yang sama ini, yakni kekuatan nasional dalam hubungan internasional, namun dengan contoh kasus dan sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini adalah kekuatan nasional Tiongkok sebagai aktor yang paling berkuasa dan berpengaruh dalam kasus perebutan dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sementara analisisnya dilakukan dengan menggunakan empat konsep kekuatan nasional, yaitu: diplomasi, informasi, militer dan ekonomi (DIME) seperti yang diperkenalkan oleh McFayden (2004). Oleh karenanya, artikel ini dapat memperkaya studi kekuatan nasional, yang ditinjau secara khusus dalam kasus tumpang tindih klaim dan konflik kepentingan negara-negara besar di LTS.

KONSEP DIME (DIPLOMATIK, INFORMASI, MILITER, DAN EKONOMI)

Kekuatan nasional didefinisikan sebagai sejumlah sumber daya untuk mendukung tujuan negara. Kekuatan negara didukung elemen seperti atribut, yang dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu “nasional” dan sosial (2021). Atribut nasional termasuk geografi, sumber daya alam, dan populasi, sedangkan atribut sosial termasuk ekonomi, politik, militer, psikologis dan informasi. Istilah instrumen kekuatan negara mengacu pada alat negara yang dipakai untuk meningkatkan pengaruh atas negara lain, organisasi internasional atau bahkan aktor-aktor non-negara. Dalam cara pandang AS, instrumen kekuatan negara adalah diplomasi, informasi, militer dan ekonomi, yang disingkat DIME. Kemampuan negara dalam meningkatkan kepentingan nasional tergantung pada efektifitas pemerintah dalam memanfaatkan untuk mencapai tujuan strategi nasional. Pejabat pemerintah resmi, biasanya mengkoordinasikan pemakaian instrumen kekuatan nasional.

Diplomasi merupakan instrumen terpenting untuk berhubungan dengan negara lain atau kelompok asing untuk meningkatkan nilai-nilai, kepentingan, tujuan, selain untuk menggalang dukungan dalam operasi militer (Farlin 2014). Diplomasi merupakan cara mendasar mengorganisir koalisi dan aliansi, termasuk entitas negara dan non-negara, sebagai mitra, sekutu, penganti, atau *proxy*. Kementerian Luar Negeri merupakan lembaga utama untuk menangani masalah-masalah terkait hubungan luar negeri. Kementerian Pertahanan bertanggungjawab untuk menyatukan kegiatan-kegiatan militer dengan aktivitas diplomatik di wilayah yang menjadi tanggungjawab. Kepala perwakilan negara biasanya seorang Duta Besar yang didukung tim yang tergabung dalam Kedutaan Besar, bertanggungjawab dengan aktivitas diplomatik-militer di luar negeri. Dalam hal ini Duta Besar beserta tim atau misi diplomatik memiliki aktivitas mendukung dan memanfaatkan instrumen-instrumen diplomatik.

Informasi tidak diragukan lagi merupakan instrumen penting kekuatan

nasional. Pernyataan: “pengetahuan adalah kekuatan”, menegaskan pentingnya informasi (Wolfberg and Young 2016). Di dalamnya termasuk perolehan, dan menganalisis, terutama dalam kaitan dengan keamanan nasional seperti kontra-terorisme. Dewasa ini informasi juga dikaitkan dengan keberadaan internet dan berita instan yang beroperasi selama 24 jam sehari, konektivitas global, dan keberadaan institusi-institusi penyedia informasi seperti *Central Intelligence Agency* (CIA). Mudahnya memperoleh informasi pada era globalisasi ini menyebabkan dunia pada abad ke 21 menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Aspek informasi juga terkait dengan aktivitas intelijen. Pentingnya informasi ditegaskan oleh ahli strategi Tiongkok Kuno, Sun Tsu, yang menyatakan: “kenalilah lawan dan dirimu sendiri, dalam seratus pertempuran kau tidak akan terkalahkan”. Jika tidak mengenali lawan tetapi mengenal diri sendiri, kesempatan untuk kalah atau menang dalam perang sama besarnya. Jika tidak mengenali lawan dan diri sendiri, dipastikan akan kalah dalam setiap peperangan” (Farlin 2014). Kekuatan informasi juga

dimanfaatkan aktor-aktor non-negara, seperti teroris dan kelompok kriminal transnasional untuk mendukung tujuan organisasi selain mengalahkan pemerintah dan sekutu-sekutunya. Kementerian Pertahanan suatu negara beroperasi di dalam jaringan global yang saling terhubung dan pemakaian media sosial yang berkembang. Informasi berbentuk komunikasi, baik yang bersifat tertulis, verbal, atau gambar yang ditampilkan atau disiarkan, dapat meningkatkan potensi dan efek strategis.

Kekuatan militer diwakili armada perang negara, atau disebut juga sebagai “*hard power*”, karena sifatnya yang kinetis (Farlin 2014). Dalam instrumen DIME, pengerahan kekuatan militer merupakan pilihan terakhir jika cara-cara lain tidak berhasil dalam mengejar kepentingan nasional. Elemen “*smart power*” lazimnya dimanfaatkan sebelum pengerahan militer. Kekuatan militer bertujuan menwujudkan rasa aman dari ancaman asing. Karena tujuan akhir aksi militer adalah untuk berperang dan memenangkan peperangan, maka instrumen ini bertujuan meningkatkan nilai tawar (*leverage*) diplomasi.

Tindakan militer dapat meningkatkan citra negara melalui ancaman atau pemakaian kekuatan militer, untuk mengalahkan lawan atau mencegah kekalahan. Instrumen militer juga bermanfaat dalam situasi damai, seperti pengerahan personil untuk menangani bencana alam. Pemakaian kekuatan militer dibatasi oleh nilai-nilai, konstitusi, dan standar profesional pemakaian senjata.

Kekuatan ekonomi termasuk pertumbuhan ekonomi dan terbukanya akses terhadap pasar global, serta kepemilikan sumber daya alam (Farlin 2014). Kekuatan ekonomi menjadi sarana mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang memungkinkan terbangunnya pertahanan nasional yang kuat. Dalam arena internasional, Departemen Keuangan bekerjasama dengan aktor-aktor pemerintah, pemerintah negara lain, dan institusi-institusi keuangan internasional. Pertumbuhan ekonomi berarti meningkatnya standar hidup, serta kemampuan memprediksi dan mencegah krisis ekonomi dan keuangan. Instrumen ekonomi tidak semata-mata mengacu pada ketahanan ekonomi, juga

bagaimana menyebarkan pengaruh terhadap negara lain (“*economic statecraft*”).

Berikut ini empat instrumen, diplomasi, informasi, militer dan ekonomi yang dianalisis untuk meninjau kekuatan Tiongkok dalam mempertahankan klaim di Laut Tiongkok Selatan. Aspek informasi yang juga merupakan bagian dari *soft power*, dimasukkan dalam pembahasan diplomasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi. Data yang berasal dari buku, jurnal, media, dan laporan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah dianalisis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu yang dibahas.

HASIL DAN DISKUSI

Konflik Tiongkok-Amerika Serikat

Tiongkok merasa terancam oleh keberadaan AS di Kawasan, dipengaruhi oleh persepsi “satu abad penghinaan” yang telah membentuk Partai Komunis Tiongkok (PKC). Tiongkok sensitif terhadap persepsi intervensi asing terhadap isu-isu yang menyinggung kedaulatan. Seperti ditulis Henry Kissinger dalam “*On China*”, bahwa cara pandang PKC berdasarkan pada tradisi sejak era kekaisaran, yang masih membekas meskipun sudah ada upaya-upaya mendasar dari Sun Yat Sen dan Mao Zedong untuk membersihkan Konfusianisme dan menjadikan Tiongkok modern (Henry Kissinger 2011). Persepsi bahwa Tiongkok adalah “Kerajaan Tengah” dan sebagai pusat peradaban dunia, sehingga semua negara tetangga yang lebih kecil harus mengakui kekuasaan, memberikan penghormatan dan membayar upeti terhadap Kaisar. Selama ribuan tahun Tiongkok merupakan negara terbesar dan terkaya di kawasan. Kebangkitan dan modernisasi Tiongkok untuk mendapatkan keunggulan dalam skala global, dipandang sebagai tuntutan

sejarah agar dapat bertahan, selain berdasarkan “mandat” sebagai pemilik peradaban tertua dunia. Interpretasi ini tidak seluruhnya digambarkan dalam PKC dibawah Ji Jinping, tetapi penting ketika Tiongkok mendapatkan kembali posisi dan pengaruhnya dari segi politik dan ekonomi.

Meningkatnya ekonomi Tiongkok menimbulkan kekhawatiran AS, yang dilatarbelakangi terjadinya defisit perdagangan yang meningkat, berkurangnya lapangan pekerjaan, serta mata uang Tiongkok yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi. Tiongkok juga banyak membeli surat berharga dan aktif dalam transaksi di *Wall Street*. Fakta-fakta ini mengarah pada perekonomian Tiongkok yang akan semakin mendominasi AS di masa mendatang. Dilain pihak, Tiongkok dianggap tidak sepenuhnya membuka akses pasar, selain munculnya kecurigaan bahwa dalam proses produksi, produsen Tiongkok banyak menerima subsidi pemerintah.

Keberhasilan ekonomi Tiongkok tidak lepas dari kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada

akhir tahun 1990-an. Pada dekade tersebut, pemerintah harus menangani pengeluaran, penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai ekspor dan pendapatan rakyat. Kebijakan untuk mengatasi masalah diantaranya yaitu keterbukaan pada kekuatan pasar, mendorong sektor manufaktur dan membuka investasi asing dalam teknologi dan keahlian teknik (Breslin 2005).

Dalam waktu relatif singkat, Tiongkok dapat melakukan industrialisasi, membangun jaringan pabrik yang menghasilkan produk konsumen dan industri yang ditujukan untuk ekspor. Pembangunan ekonomi dengan menekankan pada industrialisasi membuat Tiongkok harus mengimpor tembaga, minyak, biji besi, dan bahan mentah lain dari berbagai belahan dunia. Hal ini mengakibatkan naiknya harga komoditas yang juga dibutuhkan negara maju lain. Meskipun Tiongkok harus mengimpor dalam jumlah besar, neraca anggaran tidak defisit. Impor bahan mentah cukup besar dibandingkan dengan kemampuannya memproduksi barang yang kemudian membanjiri

seluruh dunia, termasuk ke AS. AS banyak melakukan impor bahan mentah dan produk-produk akhir dari Tiongkok, selain negara lain di Asia. Walaupun demikian, AS tetap mengalami defisit perdagangan yang makin membesar, sehingga dikenal sebagai *China Shock*.

Terlepas dari perbedaan interpretasi mengenai defisit, Tiongkok membutuhkan pasar AS untuk mengekspor produk-produknya. Tiongkok menggunakan strategi pasar dengan menekan harga jual menjadi lebih murah dan tetap memperoleh keuntungan besar dari negara lain. Hal ini membuat AS menuduh terjadi kecurangan dalam praktek dagang, selain tuduhan bahwa harga lebih murah didapat melalui subsidi pemerintah dalam proses produksi. Harga lebih murah juga karena mata uang Yuan berada dalam posisi rendah dibandingkan USD, selain kebijakan praktik *dumping*, yaitu menjual produk lebih murah di pasar luar negeri dibandingkan dalam negeri. Maka AS menganggap impor Tiongkok ke AS dilakukan 'secara ilegal' (Roper 2014). AS menganggap telah menjadi korban "praktik perdagangan yang tidak adil"

dan merasa ‘dicurangi’ karena berhasil membeli obligasi AS sehingga seolah-olah Tiongkok “membeli” AS. Kecurangan dalam praktik dagang, pertumbuhan ekonomi pesat yang mendukung perkembangan militer, serta praktek kapitalistis oleh negara otoriter dapat disimpulkan sebagai “Ancaman Tiongkok” (Gertz 2002). Persepsi mengenai ancaman ini berimplikasi pada sektor keamanan, ekonomi, dan politik (Gross 2012). Kebijakan ekonomi Tiongkok dianggap mengancam lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui strategi ekspor yang agresif.

Dalam sektor keamanan, Tiongkok dipandang menjadi sumber ancaman hak asasi manusia, selain berambisi mendominasi dunia. Dominasi dimulai dengan menduduki dan mereunifikasi Taiwan dengan Tiongkok Daratan. Jika ini berhasil, merupakan ancaman militer terhadap negara-negara di Kawasan Asia Timur. Dominasi Tiongkok dikhawatirkan mengakhiri dominasi AS, sehingga Tiongkok melakukan berbagai cara untuk memperkuat pengawasan terhadap perekonomian dunia dan secara bertahap menguasai teknologi informasi.

Meskipun hampir semua negara memiliki tujuan tersebut, Tiongkok lebih agresif, seperti mengumpulkan hak cipta, temuan, hak paten, dan rahasia dagang (Roper 2014).

Sengketa Laut Tiongkok Selatan; Klaim Teritorial Maritim dan Eskalasi Militer

LTS menjadi wilayah yang diperebutkan karena alasan ekonomis dan strategis. Dari aspek ekonomi, LTC diperkirakan memiliki sekitar 11 milyar barel (bbl) cadangan minyak dan sebanyak 190 trilyun kaki kubik (Tcf) cadangan gas alam (Cheeppensook 2020). Sumber daya ekstraksi dan pembangunan energi hanya salah satu saja dari sumber konflik. Potensi perikanan di LTS sekitar sepersepuluh dari stok ikan dunia. Dengan sekitar seperempat populasi dunia yang bertempat tinggal di pesisir, menjadikan LTS sumber bahan makanan penting (Salleh 2020). Pengelolaan yang benar dari pemerintah setempat menjadikan aspek penting untuk menjaga sumber perikanan agar tetap terpelihara, menjaga lingkungan dan mencegah penangkapan

ikan yang berlebihan (*over fishing*). Proteksi dan kebijakan ini tidak dapat dilakukan selama wilayah masih menjadi ajang perebutan (Devary 2015). Peningkatan ketegangan di LTS, melibatkan penggelaran kekuatan militer dari negara-negara besar. Ketegangan ini menjadi awal konflik militer berskala besar dan menjadi ujian apakah Tiongkok layak menempati posisi sebagai *great power*.

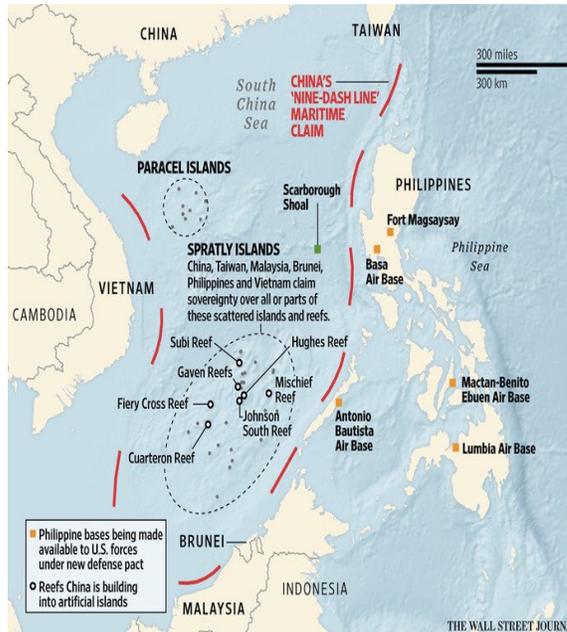
Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly (Tiongkok menamakan Xisha Qundao dan Nansha Qundao) dan Scarborough Reef (Tiongkok menamakan Huangyan Dao). Sumber kekayaan alam di wilayah laut dan gugusan kepulauan yang meliputi kandungan minyak, gas bumi dan perikanan menjadi alasan utama klaim yang belum terselesaikan. Kedua, wilayah perairan merupakan jalur perlintasan kapal-kapal internasional, terutama menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, wilayah LTS dikelilingin negara-

negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia.

Tiongkok mengklaim sekitar 80% wilayah laut (dan darat/pulau-pulau). Empat negara ASEAN (Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam) mengklaim langsung kepemilikan di LTS. Konvensi Hukum Laut Internasional PBB (UNCLOS) tahun 1982 mendefinisikan perairan wilayah berada sepanjang 12 mil laut (22.2 km, 13.8 mi) dari garis pantai negara, dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut. UNCLOS juga menyatakan bahwa struktur garis pulau harus tampak diatas laut pada waktu pasang surut sebagai pertimbangan sebuah ekstensi wilayah dan ZEE negara. Perbedaan cara pandang mengenai garis batas wilayah teritorial inilah yang menyebabkan tumpang tindih klaim. Posisi Tiongkok terhadap UNCLOS sifatnya rumit dan sulit didefinisikan. Di satu sisi, mengakui UNCLOS dalam membangun norma-norma ketika pasal-pasal yang tercantum menguntungkan. Di lain pihak, menolak ketika tidak mendukung kepentingan negaranya, sehingga alasan historis dipakai sebagai dasar klaim. Tumpang

tindih kepemilikan LTS seperti tampak pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Laut Tiongkok Selatan dan Sembilan Garis Putus-putus



Sumber: (Webber 2019)

Gambar 1 menunjukkan wilayah sengketa serta klaim sepihak Tiongkok melalui istilah “sembilan garis putus-putus” atau *Nine Dash Line* yang berwarna merah. Klaim tersebut tidak mengacu pada aturan hukum internasional melainkan alasan historis tanpa penjelasan koordinat. Bahkan pemerintah Tiongkok kadang menyebut sembilan, sepuluh, bahkan sebelas garis putus-putus. Masalah ini telah

diputuskan oleh *Permanent Court of Arbitration* pada tahun 2016, dalam sengketa Filipina melawan Tiongkok, yang dimenangkan Filipina. Luas klaim sembilan garis putus-putus, sebanding dengan 22 persen dari total wilayah darat Tiongkok, atau seluas 2.000.000 km persegi. Sembilan garis putus-putus itu meliputi wilayah-wilayah yang disengketakan dengan negara lain, termasuk Kepulauan Spratly dan Paracel yang juga diklaim oleh Filipina, dan termasuk Laut Natuna milik Indonesia (Devary 2015).

Negara-negara yang berbatasan dengan LTS telah mengirimkan petisi menolak klaim wilayah oleh Tiongkok. Seperti oleh Malaysia dan Vietnam pada Bulan Mei 2009. Akan tetapi, mengajukan kasus ke Badan Arbitrase Internasional (BAI) dimentahkan melalui tiga strategi Tiongkok dan forum-forum internasional. Strategi pertama, pesatnya pembangunan pulau-pulau reklamasi menunjukkan Tiongkok menolak menanggapi kasus ini yang menunjukkan terdapatnya perbedaan interpretasi dan ketaatan terhadap norma-norma dan hukum internasional,

hukum laut internasional dan definisi batas maritim (Devary 2015).

Strategi kedua, Tiongkok selama ini terus menerus membangun pulau-pulau di kawasan, yang diperlengkapi dengan fasilitas infrastruktur laut dan udara. Pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur laut dan udara yang dapat digunakan untuk keperluan militer terjadi di pulau-pulau kecil di Kepulauan Paracel dan Spratly.

Strategi ketiga, Tiongkok juga menggelar ADIZ (*Air Defense Initiative Zone*) di LTS selain mengadakan berbagai latihan militer. Anggaran militernya dinaikkan sekitar 6%, yang berpengaruh signifikan bagi posisi dan kekuatan Tiongkok (Li-Shih 2020). Bila hal ini berlangsung terus, maka kebebasan transportasi laut, sipil dan militer di kawasan terganggu, atau akan dikontrol Tiongkok. AS bersama dengan negara-negara *claimants*, telah secara temporer, sporadis, dan demonstratif memperlihatkan kehadiran instrumen-instrumen (kapal perang, pesawat militer). Demonstrasi kekuatan oleh AS dan negara-negara pendukungnya direspons secara kuat oleh Tiongkok.

Eskalasi ketegangan di LTS dan sekitarnya ditunjukkan melalui pernyataan Presiden Xi-Jinping di depan jajaran Angkatan Perang Tiongkok untuk siap berperang setiap saat (Zhen 2021). Harian yang sama (SCMP) melaporkan pernyataan Menlu Tiongkok di Malaysia agar negara-negara ASEAN bersatu padu melawan “pembuat onar” dari luar Kawasan (Zhen 2021). Militer Tiongkok telah mengadakan latihan di perairan LTS, termasuk menembakkan rudal penghancur kapal induk. Kemarahan Tiongkok meningkat setelah AS menyetujui penjualan peralatan militer senilai hampir USD 750 juta ke Taiwan di tahun 2021, yang menurut persepsi Tiongkok, sampai saat ini berstatus bagian wilayahnya (The Jakarta Post 2021). Sinyal persaingan juga ditunjukkan ketika pada bulan November 2020, AS dan sekutunya (Australia, Jepang, India) mengadakan latihan perang laut (*Malabar*) di LTS. Ketegangan ini telah menyebabkan Presiden AS Barack Obama mengemukakan strategi “*Asia-Pacific Rebalance*”, atau strategi untuk mengimbangi Tiongkok yang mendeklarasikan bahwa konflik

disebabkan intervensi dan keterlibatan AS (Xiaoyu 2018). Meskipun kebijakan tersebut dipandang tidak berhasil, tetapi menunjukkan kekhawatiran AS terhadap dominasi Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan.

Kontestasi AS-Tiongkok di LTS telah berkembang ke arah konflik bersenjata. Hal tersebut makin menjadi dengan pembangunan fasilitas-fasilitas sipil dan militer laut dan udara di berbagai pulau kecil. Pembangunan ini mengundang AS untuk menunjukkan kekuatan militer pada skala awal, misalnya dengan secara demonstratif mengirim pesawat-pesawat militer dan kapal-kapal perangnya. Tahap berikutnya adalah sengketa diplomatik tingkat tinggi, yang mengacu pada pernyataan-pernyataan saling serang antara pemimpin nasional AS dan Tiongkok. Tahap selanjutnya adalah mobilisasi persenjataan militer berat, yang mengacu pada pengiriman kapal-kapal induk AS, selain latihan militer Tiongkok di perairan LTS.

Tahap selanjutnya adalah membangun aliansi militer yang ditunjukkan melalui pernyataan negara

besar lain, seperti Inggris, dalam mendukung langkah AS untuk menjaga kebebasan navigasi laut dengan kekuatan militer. Hal tersebut termaterialisasi pada latihan militer bersama *Malabar*, pada Oktober 2020. Negara-negara yang berpartisipasi adalah Jepang, Australia, dan India. Kontestasi selanjutnya ditunjukkan melalui penggalangan dukungan diplomatik, melalui kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok (Wang Yi) dan AS (Michael Richard Pompeo) ke negara-negara di kawasan yang potensial menjadi mitra. Menlu Wang Yi mengunjungi 5 negara di ASEAN (Kamboja, Malaysia, Laos, Thailand, Singapura). Menlu AS Michael Richard Pompeo mengunjungi Indonesia (sebelumnya ke India, Srilanka, dan Maladewa), dalam rangka menggalang dukungan. Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan konflik LTS bukanlah kondisi normal, namun mengarah pada konflik militer. Konflik militer dalam skala terbatas maupun skala besar harus dihindari untuk menjaga stabilitas Kawasan. Maka pemahaman mengenai elemen kekuatan negara perlu dilakukan agar dapat memprediksikan langkah-

langkah negara-negara besar dalam mengelola konflik di kawasan.

Diplomasi: Pengaruh Melalui Program *Belt and Road Initiative* (BRI)

Program *Belt and Road Initiative* (BRI), yang sebelumnya dikenal sebagai *One Belt One Road* (OBOR) merupakan strategi pembangunan berskala global yang diadopsi pemerintah Tiongkok pada tahun 2013. Proyek ini melibatkan 70 negara dan organisasi internasional, meliputi tiga benua; Asia, Afrika dan Eropa. Proyek ambisius ini digagas Presiden Xi Jinping untuk mehidupkan kembali jalur sutera modern. Jangkauannya yang melibatkan dua-pertiga populasi dan tiga-perempat sumber energi global antara lain bertujuan membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang dilalui (Yağci 2018). BRI merupakan keberhasilan *soft diplomacy* dan menunjukkan kekuatan dan pengaruh ekonomi Tiongkok dalam memimpin pembangunan infrastruktur berskala global. Diplomasi melalui BRI juga melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Pendirian *Asian Investment*

Infrastructure Bank (AIIB) dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Program BRI menantang hegemoni keamanan dan ekonomi AS. Keterlibatan negara-negara dalam BRI merupakan *leverage* penting untuk menanamkan pengaruh dan meningkatkan dukungan bagi kepentingan-kepentingan politik dan strategis Tiongkok. Sebagai contoh, pertama, proyek BRI di beberapa negara seperti Sri Lanka telah melahirkan “diplomasi utang” (*debt diplomacy*) yang menguntungkan posisi strategis, politis, dan ekonomi Tiongkok. Jenis diplomasi ini memanfaatkan utang untuk mendapatkan aset-aset strategis atau pengaruh politis atas negara debitur. Tiongkok memanfaatkan akumulasi utang untuk meningkatkan tujuan-tujuan strategis jangka panjang. Salah satu tujuan strategis Tiongkok adalah melengkapi “dilemma Selat Malaka” (Devary 2015). Kedua, di LTS, BRI memperlemah dan memutuskan koalisi pimpinan AS yang bertentangan dengan kepentingan Tiongkok. Ketiga,

memungkinkan rencana Angkatan Darat dan Laut Tiongkok (PLAN) untuk mendesak masuk kearah “rangkaiian kepulauan selatan” menuju *Pacific Blue water*.

BRI sebagai sarana diplomasi Tiongkok melalui tiga tahapan. Pertama, memakai metode konsisten untuk mengumpulkan dan memanfaatkan utang, sehingga memungkinkan menerapkan tahapan-tahapan penting diplomasi dan mengidentifikasi negara-negara yang akan terpengaruh oleh jeratan utang (Parker and Chefitz 2018) Tahapan investasi diterapkan ketika AS mundur dari obligasi internasional dan menjadi lebih proteksionis. Tiongkok mengambil keuntungan dari kekosongan kekuatan global dan memanfaatkan diplomasi ekonomi yang berorientasi pada *soft power*, yang jauh lebih efektif karena mengandalkan kemampuan ekonomi dan keuangan. Hal ini juga menegaskan keterkaitan antara *hard power* dan *soft power*: ketika negara-negara tergantung pada sumber daya *hard power*, pemakaian *soft power* akan lebih efektif. Meningkatnya kemampuan ekonomi dan keuangan Tiongkok menambah kepercayaan diri

dalam mengejar ambisi sebagai negara besar melalui skema BRI. Kepercayaan ini menyebabkan Presiden Xi Jinping memasukkan proyek BRI ke dalam konstitusi Partai Komunis Tiongkok dalam Kongres ke 19, selain sebagai bingkai inisiatif dan tujuan politik luar negeri (Yağci 2018).

Tahapan kedua adalah penagihan, yang dilakukan ketika negara-negara terbukti tidak mampu membayar utang. Strategi yang dijalankan adalah terus menawarkan pengampunan utang sebagai ganti mendapatkan pengaruh politik dan strategis. Dengan adanya jaminan bahwa utang dibayarkan melalui satu atau lain cara, apakah berupa konsesi ekonomi, kesepakatan politik, atau kombinasi keduanya, Tiongkok pada jangka panjang membentuk tipe-tipe baru hubungan diplomatik dengan negara-negara debitur (Yağci 2018). Hal inilah yang terjadi dengan kasus Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka sebelum diambil-alih pengelolaannya oleh Tiongkok selama 99 tahun sejak Desember 2017. Penyerahan pelabuhan memberikan penguasaan Tiongkok terhadap kawasan yang berjarak beberapa ratus mil dari Pantai India, dan

menjadikannya jalur perdagangan dan militer yang strategis (Wibisono 2019).

Tahapan ketiga, secara efektif menunjukkan pemakaian *soft power* dan diplomasi ekonomi untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Cara-cara diplomasi dan kekuatan ekonomi dikombinasikan untuk mengejar proyek-proyek ambisius terkait konektivitas global. Tiongkok juga cerdas memanfaatkan momentum untuk mengisi kekosongan sebagai distributor utama barang-barang kebutuhan pokok dunia setelah AS diterpa krisis keuangan global. Dalam konteks strategi geopolitik di Samudera India dan Asia-Tenggara, Tiongkok melihat posisi strategis Sri Lanka. Perhitungannya adalah, jika Tiongkok berhasil menguasai alur perdagangan di Pelabuhan Sri Lanka, posisi ini akan mengamankan jalur perdagangan di Asia Selatan selain melemahkan peran strategis Selat Malaka sebagai jalur perdagangan laut penting. Penguasaan Pelabuhan Hambantota secara geopolitik berimplikasi strategis di Samudera India dan Asia Selatan. Tiongkok dapat memotong akses barang dari Samudera India tanpa harus melewati Selat Malaka.

Dari aspek keamanan, penguasaan atas Pelabuhan Hambantota dapat dipakai sebagai Pangkalan Angkatan Laut Tiongkok selain yang sudah ada di Pelabuhan Duqm (Oman) dan Pelabuhan Gwadar (Pakistan). Penguasaan Pelabuhan Hambantota juga dapat meningkatkan eksistensi Angkatan Laut Tiongkok (PLAN) di sepanjang Lautan India dan membuka akses untuk perdagangan laut yang lebih dekat ke Kawasan Asia Selatan, Asia Barat, Timur-Tengah dan Afrika.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa proyek BRI menjadi alat diplomasi Tiongkok untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan politik, keamanan dan strategis. Dari aspek diplomasi ekonomi, keberadaan BRI menjadikan Tiongkok pemimpin dalam pembangunan infrastruktur di tiga benua. Keuntungan ekonomi melalui proyek BRI meningkatkan kekuatan militer, yang berimbas pada posisi strategis Tiongkok sebagai kekuatan global.

Informasi; Pemakaian Internet dan pengelolaan “CyberArmy”

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan komunikasi dan perolehan informasi secara instan melalui jaringan internet. Tiongkok mengalami peningkatan pengguna internet sebanyak Jumlah pengguna internet di Tiongkok mencapai 940 juta per Juni 2020, atau mencakup seperlima dari total populasi dunia (Kemp 2021). Pasar telekomunikasi Cina merupakan kedua yang terbesar di dunia, selain menjadi media pendukung pertumbuhan ekonomi, dengan semakin terbukanya hubungan dagang dan perputaran ekonomi global. Meskipun kebebasan berbicara dan berpendapat masih secara ketat diberlakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya, tetapi pemakaian internet untuk kebutuhan sehari-hari sudah merupakan hal yang umum. Transaksi bisnis dan perdagangan memakai internet menjadi contoh masyarakat digital di Tiongkok. Lebih jauh lagi, untuk mengelola informasi, *Cyber army* Tiongkok termasuk yang terkuat di dunia (Maulana 2015).

Pada masa kepemimpinan Xi Jinping, aktivitas *cyber* mendapatkan perhatian besar. Dalam rencana Lima Tahun ke-13, keamanan *cyber*, pengembangan internet, pengawasan dan pengumpulan *big data* terkait informasi warga negara menjadi salah satu prioritas tertinggi. Dalam Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-19, Xi Jinping menekankan keamanan *cyberspace* menjadi salah satu kekuatan dalam politik luar negerinya. Xi Jinping juga membentuk ‘*cyber sovereignty*’, yakni memberikan kedaulatan penuh dalam mengatur kebijakan terkait penggunaan internet domestik. Meskipun dikritisi karena secara tidak langsung kontradiktif terhadap sifat alami internet yaitu kebebasan arus informasi, pemerintah Tiongkok tetap memberlakukan kebijakan pembatasan untuk kepentingan politik (Rizkia 2018).

Lembaga di Tiongkok yang khusus menangani peperangan angkasa, psikologis, dan pengelolaan kekuatan cyber adalah *Strategic Support (SS)*. SS dibentuk tahun 2016, dan merupakan reformasi dari *PLA Service and General Staff Department*. PLA ingin

menyentralisasikan misi-misi perang angkasa, *cyber*, elektronik, dan psikologis dalam satu angkatan. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa mencapai dominasi informasi dalam spektrum elektromagnetik dan menghalang penggunaannya oleh musuh menjadi kebutuhan untuk tetap unggul secara strategis dalam konflik.

Organisasi SS terbagi dalam dua departemen; Departemen Sistem Luar Angkasa (DSL), yang bertanggung jawab untuk kegiatan militer luar angkasa dan Departemen Jaringan Sistem (DJS) yang menangani bidang operasi berbasis informasi. Misi DJS meliputi perang *cyber*, pengintaian berbasis teknologi, perang elektronik, dan perang psikologis. Dengan meletakkan misi-misi tersebut dalam satu organisasi, Tiongkok mengelola berbagai tantangan koordinasi operasional yang menghalangi pembagian informasi.

Konsep perang *cyber* telah menjadi hirauan pemerintah Tiongkok sejak decade 1990-an, yang terinspirasi dari penerapan teknologi informasi dan propaganda oleh militer AS dalam

Perang Teluk, perang di Kosovo, Afghanistan, dan Irak. Terbukti dalam berbagai perang dan konflik, penguasaan teknologi informasi berperan penting dalam memenangkan peperangan.

Dua tahun pasca Perang Teluk (1993), Tiongkok mengganti pedoman perangnya menjadi "Memenangkan peperangan lokal dengan strategi perang internasional, melalui penerapan teknologi". Dalam pedoman yang bertajuk: "Pertahanan Nasional" tahun 2004, diganti menjadi: "informasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan berperang pasukan bersenjata" (Rizkia 2018).

Tahun 2013, Tiongkok secara publik mefokuskan peperangan *cyber* secara menyeluruh, yang tertuang dalam studi oleh Akademi Sains Militer yang menonjolkan dunia *cyber* telah menjadi ruang baru dan penting dalam militer. Hal senada juga dikemukakan dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional pada 2015 berjudul "Strategi Militer Tiongkok". Telah disadari bahwa luar angkasa dan ruang *cyber* telah menjadi puncak komando baru dalam kompetisi strategis semua pihak. Bentuk

perang telah berevolusi dengan cepat menuju informasialisasi.

Tiongkok mengerahkan segala usaha membentuk pasukan *cyber* sebagai respon atas praktik perang *cyber* yang dilakukan negara lain. Meskipun masih belum menandingi AS, Tiongkok mengejar dalam enam kriteria termasuk Riset dan Pengembangan (R&D). Kriteria lainnya adalah kemajuan teknologi dan kapasitas inovasi, perusahaan teknologi informasi, skala infrastruktur internet, pengaruh situs web. Kriteria lainnya adalah diplomasi internet, kemampuan regulasi asing, kekuatan militer dan strategi yang komprehensif.

Laporan dari Angkatan Laut AS pada Maret 2019 mengatakan Tiongkok telah menjadi negara adidaya melalui berbagai strategi komprehensif yang meliputi mendapatkan informasi penting AS dan properti intelektual (IP) teraliansi melalui pencurian siber. Tiongkok secara efektif menggunakan IP yang dicuri untuk menumbuhkan produk nasional brutonya (GNP) dan mendapatkan keuntungan militer jangka pendek dan

Panjang. Tindakan ini telah mengubah kalkulasi kekuatan global (Segal 2017).

Militer: Kekuatan Pendukung Untuk mempertegas Klaim Wilayah

Satuan militer di bawah pemerintah Tiongkok atau *People Liberation Army* (PLA) merupakan yang terbesar di dunia dengan jumlah pasukan aktif sebanyak lebih dari empat juta orang (IISS 2018). Sumber yang sama tahun 2019 menunjukkan Tiongkok menduduki posisi kedua alokasi anggaran militer tertinggi setelah AS, sebesar USD 168,2 miliar. PLA memiliki lima angkatan; Darat, Udara, Laut, Angkatan Roket, dan *Strategic Support* (SS). Dalam konteks sengketa di LTS, kekuatan militer mendukung Tiongkok mempertegas klaim wilayah.

Kekuatan Angkatan Laut Tiongkok ditopang keberadaan dua kapal induk, mampu membuat pesawat tempur *stealth*, menguasai teknologi digital tinggi untuk perang *cyber*, dan mampu mengirimkan pesawat luar angkasa ke bagian gelap bulan yang mensiratkan kemampuan pengamatan dari titik strategis (luar angkasa). Tiongkok juga

maju dalam bidang bio-teknologi yang memungkinkan melakukan perang biologis, di samping jumlah personel militer yang amat banyak dengan disiplin luar biasa. Kepemilikan rudal jelajah dan nuklir juga telah merupakan rahasia umum. Intinya, saat ini Tiongkok telah menjadi sebuah negara besar dengan kekuatan militer efektif, defensif dan ofensif yang tinggi. Yang jelas Tiongkok mempunyai ambisi perluasan teritorial maritim. Aspek-aspek ekonomi dan militer-keamanan menunjukkan agresifitas Tiongkok terutama terkait isu sengketa wilayah.

Secara historis Tiongkok terganggu dengan keberadaan Armada Ketujuh AS, dan memandang bahwa aliansi militer di kawasan merupakan upaya untuk mencegah Tiongkok menjadi kekuatan hegemonik di Asia. Keterlibatan Angkatan Laut di Kawasan merupakan rencana Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok dalam 60 tahun terakhir. Pembangunan PLA terkait sistem anti-kapal nuklir (*anti-ship ballistic missile system*) menunjukkan fokus terhadap teknologi dan *platform*

yang didesain untuk wilayah kapal pengangkut (Waldron 2005).

Modernisasi militer secara menyeluruh yang meliputi persenjataan, teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya korporasi didukung kekuatan ekonomi Tiongkok (Bergsten et al. 2008). Kekuatan militer juga didukung persenjataan baru dan kemampuan tempur, reformasi kelembagaan, sistem, serta pengembangan doktrin tempur baru. Peningkatan kapabilitas militer antara lain ditunjukkan dengan beroperasinya kapal selam Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat jauh dari pantai Tiongkok, selain menunjukkan kemampuan dalam uji coba penghancuran satelit milik sendiri di luar angkasa. Uji coba dilakukan sebagaiantisipasi bahaya yang secara langsung terhubung dengan luar angkasa. Keberhasilan modernisasi militer yang didukung peningkatan anggaran belanja militer terkait doktrin bahwa pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional dilakukan untuk mendukung keamanan nasional dan pembangunan. Sejak 1989,

Tiongkok meningkatkan anggaran pertahanannya hingga dua digit.

Modernisasi militer dan ekonomi terkait erat dengan meningkatnya peran Tiongkok pada tataran global. Kekhawatiran negara-negara di Asia tampak ketika Tiongkok terlibat perselisihan tumpang-tindih klaim wilayah di Laut Tiongkok Timur, Kashmir, Selat Taiwan, selain di LTS. Kekhawatiran para pembuat kebijakan dan pengamat disebabkan keterbatasan data dan ketertutupan informasi mengenai intensitas dan penggunaan anggaran militer. Ketidakjelasan data menyebabkan sejumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah di AS menyajikan informasi dan hasil kajian yang berbeda. Angka-angka yang dilansir lembaga-lembaga penelitian militer bahkan dua kali lipat lebih tinggi daripada angka resmi yang dilaporkan Beijing. Ketertutupan data membuat anggaran belanja pertahanan Tiongkok tidak dapat diperhitungkan secara pasti. Menurut Kementerian Pertahanan AS dan *Central Intelligence Agency* (CIA), jumlahnya berkisar antara USD 80-90 milyar (CIA 2005). Sementara itu, *International Institute for Strategic*

Studies, mengutip angka sekitar USD 40 milyar, sementara *RAND Corporation* menunjukkan angka sekitar USD 31-38 milyar (Crane et al. 2005).

Masalah transparansi dalam anggaran militer Tiongkok meningkatkan kekhawatiran mengenai dinamika sebagai kekuatan ekonomi dan militer. Untuk itu Tiongkok mempublikasikan Kertas Putih Pertahanan, yang memuat pesan strategis yang menekankan pada transparansi data (Chase et al. 2016). Kertas Putih Pertahanan juga menegaskan bahwa kenaikan anggaran belanja dan modernisasi militer dilakukan dengan cara yang pantas. Informasi ini terdapat dalam kalimat pembuka bab VIII mengenai “Anggaran Belanja”.

Perkembangan ekonomi, militer dan politik pada tingkat global mendukung kebangkitan Tiongkok yang mengundang berbagai reaksi. Reaksi negatif didukung sikap yang membatasi diri dan jauh dari sikap hangat. Pernyataan pejabat pemerintah Tiongkok dalam berbagai isu internasional, mulai dari kebijakan moneter hingga perselisihan teritorial cenderung tegas dan tajam. Meningkatnya perkembangan

ekonomi dan militer Tiongkok sesuai pernyataan Kennedy: “Kekayaan diperlukan untuk mendukung kekuatan militer, dan kekuatan militer biasanya dibutuhkan untuk memperoleh dan melindungi kekayaan” (Kennedy 1989). Pandangan Kennedy sesuai dengan fakta bahwa kekayaan yang meningkat disertai peningkatan kekuatan militer.

Perbedaan interpretasi dalam anggaran belanja pertahanan, menyebabkan ketidapastian mengenai kekuatan nasional. Maka kekhawatiran negara lain meningkat terhadap pengaruh global Tiongkok, mengingat penegasan terhadap “kepentingan inti (*core interest*)”, seperti unifikasi dengan Taiwan dan integritas wilayah yang masih terus diperjuangkan. Kegagalan memenuhi dan menegaskan kepentingan ini dapat menimbulkan tantangan internal dan eksternal. Hal ini terkait dengan keberlangsungan rezim dan pembangunan ekonomi, serta masa depan Tiongkok.

Ekonomi; Pertumbuhan yang Mendukung Posisi Sebagai Adidaya Ekonomi Global.

Tiongkok sudah memenuhi persyaratan sebagai negara adidaya ekonomi global, yang memiliki tiga kriteria, yakni pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian dunia, tingkat pertumbuhan yang dinamis dan menjadi bagian dari perdagangan dan arus modal (Bergsten et al. 2008). Laporan Bank Dunia tahun 2013 menunjukkan, nagka PDB menurut paritas daya beli (*Gross Domestic Product/GDP based on purchasing power parity/PPP*) menunjukkan posisi Tiongkok pada urutan ke-2, setelah AS. Pada tahun 2014, posisi Tiongkok meningkat ke urutan pertama mengalahkan AS. Data yang sama menunjukkan Tiongkok menjadi negara pengeksport terbesar dan importir kedua dunia. Data Bank Dunia (2021) melaporkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 8,5 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 0,6 persen dari proyeksi sebelumnya. Data-data ini menunjukkan kekuatan ekonomi bergeser dari AS ke Tiongkok (World Bank 2021).

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi pada awal dekade 1990, memaksa pemerintah Tiongkok untuk melakukan reformasi ekonomi yang fundamental. Reformasi dilakukan pada sistem fiskal, keuangan, dan pasar, selain pengurangan anggaran besar-besaran dalam operasionalisasi perusahaan negara. Keberhasilan reformasi ekonomi ditunjukkan dengan masuknya Tiongkok ke dalam sistem ekonomi dunia, yang ditandai dengan keanggotaanya dalam *the World Trade Organization* (WTO) pada tahun 2001. Beberapa tahun setelah akhir Perang Dingin, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok berhasil melakukan reformasi besar-besaran, namun belum menunjukkan kapabilitas negara. Hal ini dikarenakan Tiongkok mengadopsi kebijakan *taoguangyanghui* yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping, yang menyembunyikan kapabilitas sambil menunggu waktu yang tepat untuk menampilkan kekuatan pada tataran global.

Reformasi Deng Xiaoping menghasilkan pertumbuhan pesat pada ekonomi Tiongkok, yaitu sekitar 9%. Selanjutnya, pada dekade awal abad ke-

21, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sekitar 10%. Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok mengalami kenaikan di atas AS yang pada saat itu sebesar USD 4000. Hal ini menempatkan perekonomian Tiongkok melebihi Jepang dan mendapatkan posisi terbesar kedua dunia. Reformasi Tiongkok pada tahun 1990-an berdampak signifikan pada 10 tahun setelah mulai dijalankan. Ketika sejumlah negara Barat berada dalam situasi sulit akibat perlambatan ekonomi global pada tahun 2008-2010, Tiongkok justru mengalami surplus anggaran dan mampu membeli sejumlah perusahaan dan sumber daya di seluruh dunia (Every CSR Report 2019).

Pada tataran global, Tiongkok telah menjadi negara adidaya ekonomi, dengan predikat perekonomian nasional terbesar kedua dan eksportir kedua terbesar. Tiongkok juga memiliki angka surplus perdagangan dan cadangan mata uang asing terbesar di dunia. Sejak tahun 1978-2006, ketika Deng Xiaoping memulai reformasi ekonomi, Tiongkok mampu meningkatkan pendapatan produk domestik bruto sebanyak 13 kali lipat.

SIMPULAN

Melalui analisis DIME, terbukti bahwa posisi Tiongkok dalam sengketa wilayah di LTS unggul karena didukung kekuatan diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi. Aspek diplomasi dan negosiasi menjadi faktor yang krusial, yang ditunjukkan melalui keberhasilan merangkul negara-negara di Kawasan melalui proyek BRI. Megaprojek prestisius ini sangat potensial mempengaruhi kepentingan dan proses pengambilan keputusan negara-negara di kawasan. Keunggulan Tiongkok dalam mengelola informasi menjadi pendukung keberhasilan diplomasi untuk mengejar kepentingan politik luar negeri. Dalam hal militer, posisi sebagai salah satu kekuatan militer global, semakin ditunjang oleh kekuatan ekonomi yang memungkinkan berkembangnya reformasi dan modernisasi militer. Dukungan anggaran untuk persenjataan, menjadikan militer Tiongkok salah satu yang terkuat di dunia. Perekonomian Tiongkok ditunjang tingkat pertumbuhan yang pesat menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya (*the Great Power*). Negara-negara di kawasan memiliki

ketergantungan yang tinggi khususnya terhadap produk-produk impor unggulan Tiongkok. Produk-produk berbiaya rendah sampai saat ini membanjiri pasar di Asia Tenggara dan Asia Timur. Tiongkok juga terlibat dalam mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur masif di sejumlah negara

Dalam kasus sengketa LTS, Tiongkok berhasil memanfaatkan kekuatan nasionalnya untuk menguasai perairan. Tiongkok yang telah dan terus membangun pulau-pulau buatan yang dilengkapi dengan fasilitas militer, yang berpengaruh terhadap persepsi dan citranya di negara-negara sekitar. Penolakan Tiongkok terhadap keputusan dan norma yang ditetapkan lembaga internasional seolah-olah merupakan pernyataan atas kesiapan Tiongkok menghadapi perang terbuka dengan negara-negara penantangannya di Kawasan. Melihat keunggulan Tiongkok dalam bidang diplomasi, militer dan ekonomi, maka pertarungan di LTS berpotensi dimenangkan oleh Tiongkok. Kasus LTS menunjukkan bahwa posisi penguasa kawasan dapat berpindah dari AS ke Tiongkok.

REFERENSI

- Bergsten, C. Fred, Charles Freeman, Nicholas Lardy, and Derek Mitchell. 2008. *China's Rise: Challenges and Opportunities*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Breslin, Shaun. 2005. "Power and Production: Rethinking China's Global Economic Role." *Review of International Studies* 31(4):735–53. doi: 10.1017/S026021050500673X.
- Chase, Michael S., Jeffrey Engstrom, Tai Ming Cheung, Kristen Gunness, Scott W. Harold, Susan Puska, and Samuel K. Berkowitz. 2016. *China's Incomplete Military Transformation Assessing the Weaknesses of the People's Liberation Army (PLA)*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Cheppensook, Kasira. 2020. "ASEAN in the South China Sea Conflict, 2012–2018: A Lesson in Conflict Transformation from Normative Power Europe." *International Economics and Economic Policy* 17:747–64. doi: <https://doi.org/10.1007/s10368-020-00477-z>.
- CIA. 2005. *The CIA World Factbook*.
- Crane, Keith, Roger Cliff, Evan Medeiros, James Mulvenon, and William Overholt. 2005. *Modernizing China's Military Opportunities and Constraints*. Arlington.
- Devary, Scott. 2015. "Diplomacy and the South China Sea." *The Diplomat*. Retrieved August 24, 2021 (<https://thediplomat.com/2015/08/diplomacy-and-the-south-china-sea/>).
- Every CSR Report. 2019. "China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States." *EveryCSRReport.Com*. Retrieved (<https://www.everycsrreport.com/reports/RL33534.html>).
- Farlin, Jeff. 2014. *Instruments of National Power: How America Earned Independence*. Philadelphia.
- Gertz, Bill. 2002. *The China Threat: How the People's Republic Targets America*. Washington, D.C: Regnery Publishing Inc.
- Gross, Donald. 2012. *The China Fallacy: How the U.S. Can Benefit from China's Rise and Avoid Another Cold War*. New York: Bloomsbury.
- Henry Kissinger. 2011. "On China." *China Review International* 18(2):200–214.
- IISS. 2018. "The Military Balance 2018." *IISS*. Retrieved (<https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2018>).
- Kemp, Simon. 2021. "Digital 2021: The Latest Insight into the 'State of Digital.'" *We Are Social*. Retrieved (<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>).
- Kennedy, Paul. 1989. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. New York: Vintage

- Book.
- Li-Shih, Lu. 2020. "Is China Preparing to Set Up an ADIZ in the South China Sea With Taiwan in Mind?" *The Diplomat*. Retrieved (<https://thediplomat.com/2020/11/i-s-china-preparing-to-set-up-an-adiz-in-the-south-china-sea-with-taiwan-in-mind/>).
- Maulana, Adhi. 2015. "Diam-Diam China Punya Tentara Cyber Terkuat Di Dunia." *Liputan6.Com*.
- McFadyen, James L. 2004. "The Instruments of National Power in Respect to the United States Counterdrug Efforts in Colombia." North Carolina State University.
- Parker, Sam, and Gabrielle Chefitz. 2018. *Debtbook Diplomacy*. Cambridge: Harvard Kennedy School.
- Rizkia, Shafira. 2018. "Tantangan Domestik Cina Di Era Informasi." *Trendsoptting Paradoxes*. Retrieved (<https://shafirarizkia.wordpress.com/2018/04/17/tantangan-domestik-cina-di-era-informasi/>).
- Roper, Carl. 2014. *Trade Secret Theft, Industrial Espionage, and the China Threat*. Florida: CRC Press.
- Salleh, Asyura. 2020. "The South China Sea: Preventing the Tyranny of the Commons." *The Diplomat*.
- Segal, Adam. 2017. "Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty." *Hoover Institution*. Retrieved (https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/segal_chinese_cyber_diplomacy.pdf).
- Simon, Sheldon W. 2012. "Conflict and Diplomacy in the South China Sea." *Asian Survey* 52(6):995–1018.
- The Jakarta Post. 2021. "US Approves Potential 750 Million Weapon Sales to Taiwan." *The Jakarta Post*. Retrieved (<https://www.thejakartapost.com/news/2021/08/05/us-approves-potential-750-million-weapons-sales-to-taiwan.html>).
- Wade, Norman. 2021. "The Instruments of National Power." *The Lightning Press*. Retrieved (<https://www.thelightningpress.com/the-instruments-of-national-power/>).
- Waldron, Arthur. 2005. "The Rise of China: Military and Political Implications." *Review of International Studies* 31(4):715–33.
- Webber, Luas. 2019. "China's 'Nine-Dash Line' Maritime Claim." *Threader*.
- Wibisono, Adhe Nuansa. 2019. "China's 'Belt and Road Initiative' in Sri Lanka : Debt Diplomacy in Hambantota Port Investment." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 2(2):222–45. doi: <http://dx.doi.org/10.33822/mjih.v2i2.1482>.
- Wolfberg, Adrain, and Brian A. Young. 2016. "Is Intelligence an Instrument of National Power?" *American Intelligence Journal* 33(1):26–30.
- World Bank. 2021. "China Economic Update-June 2021." *World Bank*.

Retrieved August 23, 2021
(<https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-june-2021>).

Xiaoyu, Zhao. 2018. "Why Obama's Rebalance towards Asia-Pacific Was Unsuccessful?" *International Studies* 55(2):87–105. doi: <https://doi.org/10.1177/0020881718791040>.

Yağci, Mustafa. 2018. "Rethinking Soft Power in Light of China's Belt and Road Initiative." *Uluslararası İlişkiler Dergisi* 15(57):67–68. doi: [10.33458/uidergisi.518043](https://doi.org/10.33458/uidergisi.518043).

Zhen, Liu. 2021. "Xi Jinping Orders China's Military to Be Ready for War 'at Any Second.'" *South China Morning Post*.